



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT TAHUN 2018**

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya-lah penyusunan "Laporan Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018" dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan dan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan misi Kota Yogyakarta, disamping itu Laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Inspektur Kota Yogyakarta



Drs. Maryoto, MM

NIP. 19610801 198503 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2017 - 2022. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
1	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83%	88%	106%

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik, dengan perincian capaian sebagai berikut :

% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 83%.

Realisasi Tahun 2018 sebesar 88% sudah sesuai target sasaran 83%, sehingga tercapai 106%. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui evaluasi tindak lanjut temuan APiP dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran tersebut diatas dapat diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi dikalikan 100%. Data jumlah rekomendasi dari tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Jumlah Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk | : 80 buah. |
| 2. Jumlah Rekomendasi Inspektorat DIY | : 10 buah. |
| 3. Jumlah Rekomendasi Irjen | : 0 buah. |
| 4. Jumlah Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY | : 0 buah. |
| 5. Jumlah Rekomendasi BPK | : <u>26 buah.</u> |
| Jumlah total Rekomendasi | : 116 buah |

Data jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Jumlah TL Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yk | : 79 buah. |
| 2. Jumlah TL Rekomendasi Inspektorat Propinsi | : 10 buah. |
| 3. Jumlah TL Rekomendasi Irjen | : 0 buah. |
| 4. Jumlah TL Rekomendasi BPKP Perwakilan DIY | : 0 buah. |
| 5. Jumlah TL Rekomendasi BPK | : <u>13 buah.</u> |
| Jumlah | : 102 buah. |

<p>persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	$= \frac{102}{116} = 88 \%$
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Pencapaian kinerja % (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2018 sudah melebihi target yaitu dengan pencapaian sebesar 106 %.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Inspektur Kota Yogyakarta



Drs. Maryoto, MM

NIP. 19610801 198503 1 010

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	KATA PENGANTAR	ii
	IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR GRAFIK	ix
	DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	PENDAHULUAN	
A	Latar Belakang	1
B	Maksud dan Tujuan	1
C	Gambaran Umum Inspektorat	1
D	Sumber Daya Manusia	4
E	Sarana dan Prasarana Kerja	7
F	Keuangan	9
G	Sistematika Penyusunan	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A	Rencana Strategik	12
B	Rencana Kinerja Tahunan	18
C	Perjanjian Kinerja	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A	Capaian Kinerja Inspektorat	19
1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017 - 2022	20
2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target jangka menengah Renstra	
3	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	21
4	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	24
B	Realisasi Anggaran	32
BAB IV	PENUTUP	35

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan SKPD
2. Pengukuran Kinerja 2018

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2018	5
Tabel I.2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2018	6
Tabel I.3.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2018	6
Tabel I.4.	Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Perjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2018	7
Tabel I.5.	Profil Sarana dan Prasarana	8
Tabel I.6.	Anggaran per kegiatan dan per belanja	9
Tabel II.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	13
Tabel II.2	IKU Inspektorat	16
Tabel II.3	Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis	17
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel III.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018	19
Tabel III.3	Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2017 s/d Tahun 2022	20
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2017 s/d 2022 dengan Target Jangka Menengah	21
Tabel III.5	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2017 dan 2018.	22
Tabel III.6	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018 dan pending tahun sebelumnya.	23
Tabel III.7	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY	23
Tabel III.8	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Teknis	23
Tabel III.9	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP	24
Tabel III.10	Pengukuran Kinerja Program Strategis	25
Tabel III.11	Data Temuan dan Rekomendasi Kegiatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	26
Tabel III.12	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	26
Tabel III.13	Data Temuan dan Rekomendasi Kegiatan Audit Bidang Keuangan dan Aset	27
Tabel III.14	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Bidang Keuangan dan Aset	28
Tabel III.15	Data Temuan dan Rekomendasi Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	29
Tabel III.16	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	30

Tabel III.17	Data Temuan dan Rekomendasi Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya	30
Tabel III.18	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya	31
Tabel III.19	Jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut aparat pengawasan Tahun 2018	31
Tabel III.20	Data Formasi dan Bezeting Sumber Daya Manusia Inspektorat Tahun 2018	32
Tabel III.21	Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018	33
Tabel III.22	Perbandingan Anggaran dan Realisasi per belanja Tahun 2017 dan Tahun 2018	34
Tabel III.23	Alokasi dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2018	5
Grafik I. 2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2018	5
Grafik I. 3	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2018	6
Grafik I. 4	Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2018	7
Grafik III. 1	Realisasi IKU Tahun 2018	20
Grafik III. 2	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2017 dan 2018	21
Grafik III. 3	Perbandingan Anggaran per Triwulan dan Realisasi Anggaran	33

DAFTAR BAGAN

Bagan I. 1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat	3
------------	-----------------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	Gek Fisik Audit Dengan Tujuan Tertentu	29
---------------	----------------------------------------	----

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada public atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari RPJMD periode 2017 – 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2018 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 antara lain adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Inspektorat selama Tahun 2018 yang merupakan tahun kedua RPJMD periode 2017 – 2022
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat di Tahun 2018 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja Inspektorat di tahun berikutnya

Dengan demikian, Laporan Kinerja Inspektorat yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

C. Gambaran Umum Inspektorat

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta. Inspektorat Kota Yogyakarta adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

a. Jumlah Auditi

Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Kecamatan, Sekolah di Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta sejumlah 203 satuan/unit kerja, terdiri dari:

- Lembaga Teknis (Badan, Setwan, Inspektorat)	: 5
- Dinas	: 21
- UPT	: 35
- Kantor	: 1
- Sekretariat Daerah	: 8 Bagian
- Kecamatan	: 14
- RSUD	: 1
- Puskesmas	: 18
- SMP	: 16
- SD	: 89

b. Jangkauan pemeriksaan.

Audit Operasional Tahun 2018 telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2018 dengan ketentuan Sasaran Audit pada Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Aspek Sumber Daya Manusia.

Selama Tahun 2018 Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan Audit Operasional pada 40 Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada 40 auditi.

c. Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat meliputi :

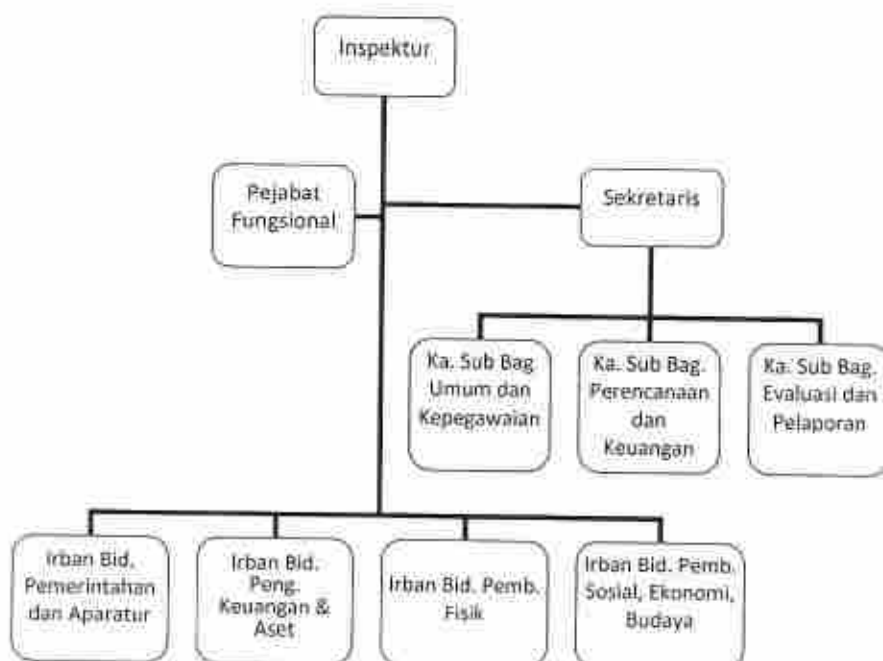
- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

- 1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur
- VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset
- 1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - 2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
- VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
- 1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
 - 2 Review Pengadaan Barang dan Jasa
- VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
- 1 Pengawasan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
 - 2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
- IX. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
- 1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur yang membawahi sekretariat, Inspektur pembantu dan pejabat fungsional tertentu sebagaimana pada bagan di bawah ini :

Bagan I. 1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat



1. Inspektur
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Analis Tata Usaha
 - 2) Pengadministrasi Umum
 - 3) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 - 5) Petugas Keamanan
 - 6) Pramuka Bakti
 - 7) Pengemudi
 - 8) Pramuka Kebersihan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Bendahara
 - 2) Verifikator keuangan
 - 3) Pengolah Data Laporan Kas
 - 4) Pengelola Gaji
 - 5) Pengadministrasi Keuangan
 - 6) Analis Rencana Program dan Kegiatan
 - 7) Pengelola Akuntansi
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
 - 3) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan
3. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
4. Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
5. Irban Bidang Pembangunan Fisik
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
6. Irban Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sumber Daya Manusia

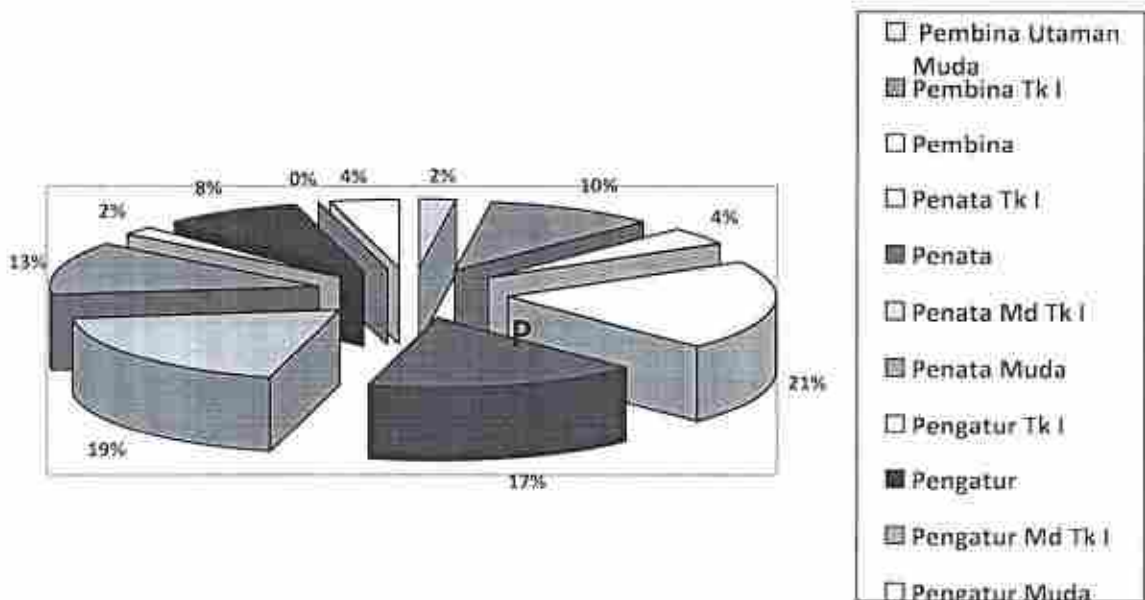
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 121 orang, jumlah pegawai yang ada 49 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 72 orang atau 60 %.

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2018 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang PNS dan 1 orang PTT/Naban dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2018

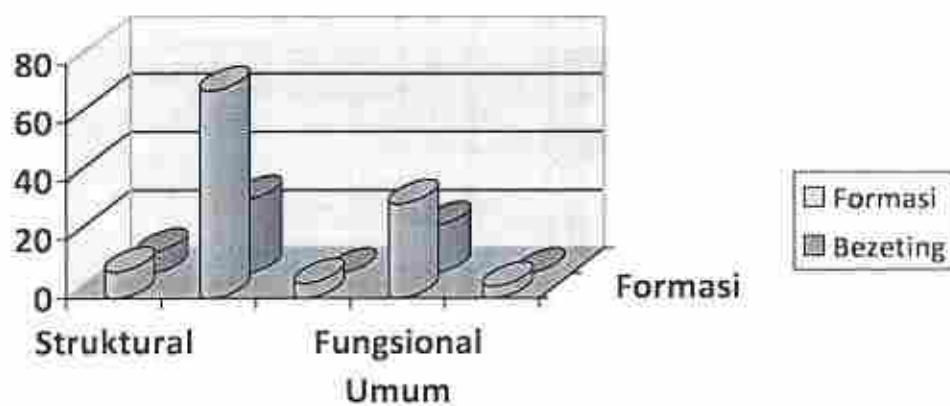
No.	Pangkat	Gol	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	2.08
2.	Pembina Tingkat 1	(IV/b)	5	10.42
3.	Pembina	(IV/a)	2	4.17
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	10	20.83
5.	Penata	(III/c)	8	16.67
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)	9	18.75
7.	Penata Muda	(III/a)	6	12.50
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	1	2.08
9.	Pengatur	(II/c)	4	8.33
10.	Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)	0	0.00
11.	Pengatur Muda	(II/a)	2	4.17
		Jumlah	48	100.00



Grafik I. 1.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2018

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2018

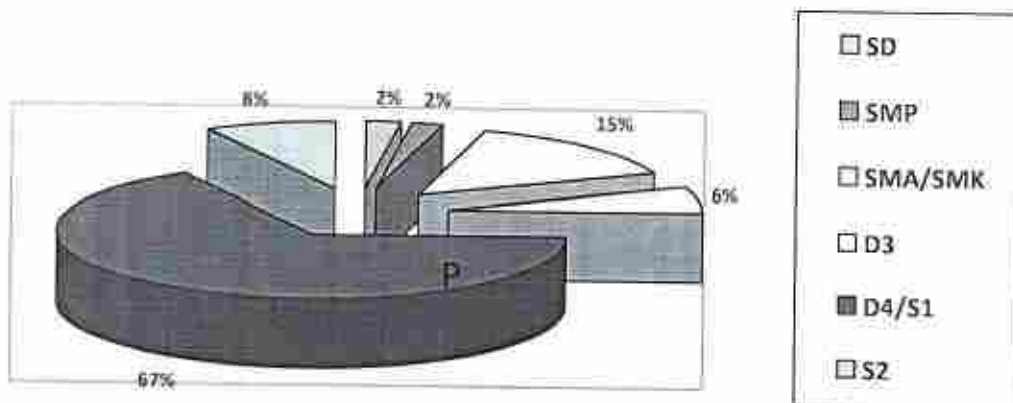
No	Jabatan	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	9	7	14.58
2	Auditor	71	25	52.08
3	P2UPD	5	0	0.00
4	Fungsional Umum	32	16	33.33
5	Auditor Kepegawaian	4	0	0.00
	Jumlah	121	48	100.00



Grafik 1.2.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2018

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2018

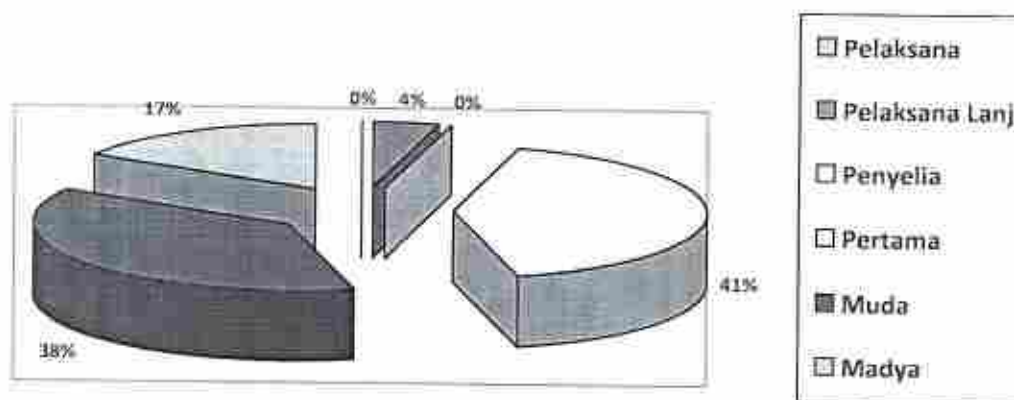
No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	1	2.08
2	SMP	1	2.08
3	SMA/SMK	7	14.58
4	D3	3	6.25
5	D4/S1	32	66.67
6	S2	4	8.33
	Jumlah	48	100.00



Grafik 1.3.
 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2018.

Tabel 1.4
 Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2018

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Pelaksana	0	0.00
2	Pelaksana Lanjutan	1	4.00
3	Penyelia	1	4.00
4	Pertama	10	40.00
5	Muda	9	36.00
6	Madya	4	16.00
	Jumlah	25	100.00



Grafik 1.4
 Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2018

E. Sarana dan Prasarana Kerja

Inspektorat Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Gambiran No. 26 Yogyakarta dengan luas tanah 1.031 m² terdiri bangunan depan 904,5 m² dan bangunan belakang 126,5 m², namun pada

bulan Oktober sudah menempati gedung baru di Jl. Kenari Nomor 51 Yogyakarta dengan luas tanah 730 m² terdiri bangunan m².

Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yaitu:

Tabel 1.5.
Profil Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	13
2	Kendaraan Roda 4	6
3	Handycam	2
4	LCD Proyektor	3
5	Camera digital	4
6	Rollmeter	3
7	Scanner	3
8	Komputer	23
9	Printer	20
10	Lap Top	24
11	Pengukur ketebalan besi	1
12	Checker penghitung	2
13	Pengukur Test beton	2
14	Telephone PABX LG	2
15	Meteran Laser	4
16	Telephone SLJJ world phone	1
17	Mesin Penghancur Kertas	1
18	Tablet	1
19	CCTV	1
20	Whiteboard 2 muka	1
21	Wireles	2
22	Air Purifyer	2
23	Meja kubikal	24
24	Kursi kerja	36
25	Sepeda	1
26	Scaner portable	4

F. KEUANGAN

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2018 adalah Rp. 5.103.110.829,00 (Lima milyar seratus tiga juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 3.231.105.119,00

2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.872.005.710,00 terdiri dari 9 Program dan 16 kegiatan dengan rincian anggaran per belanja sebagai berikut :

Tabel I. 6
Anggaran per kegiatan dan per belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	BELANJA	5.103.110.829
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.231.105.119
	Belanja Pegawai	3.231.105.119
	Gaji dan Tunjangan	3.231.105.119
B	BELANJA LANGSUNG	1.872.005.710
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.108.509.014
1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	501.140.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	501.140.000
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.714.854
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	313.071.764
	c. Belanja Modal	269.643.090
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24.654.160
	a. Belanja Pegawai	24.654.160
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.261.710
1	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor	12.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ opr	101.261.710
	a. Belanja Barang dan Jasa	101.261.710

III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	184,161,800
1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	184,161,800
	a. Belanja Barang dan Jasa	184,161,800
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,315,250
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	8,315,250
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	8,315,250
V.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	234,172,000
1	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	21,690,000
	a. Belanja Pegawai	1,700,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	19,990,000
2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	212,482,000
	a. Belanja Pegawai	112,675,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	98,807,000
VI.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset	48,240,000
1	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	24,320,000
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,320,000
2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	23,920,000
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	23,920,000
VII.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	40,935,000
1	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	35,984,000
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	35,984,000
2	Review Pengadaan Barang dan Jasa	4,951,000
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	4,951,000
VIII.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	41,601,600

1	Pengawasan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	24,164,000
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,164,000
2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	17,437,600
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	17,437,600
IX.	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	92,809,136
	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	92,809,136
	a. Belanja Pegawai	5,700,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	87,109,136

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Inspektorat, gambaran singkat tentang Tugas pokok dan Fungsi, Sumber Daya manusia, Sarana dan Prasarana serta Sistematika Penyusunan.

2. BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

3. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018. Analisis Capaian kinerja Tahun 2018 antara lain dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran, analisis atas efisiensi anggaran dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4. BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu Tahun 2018 dan upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta memuat Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah "Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan"

Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan karena Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan
- c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.
- d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-7.

3. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Inspektorat dirumuskan sebagai berikut.

Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan uraian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3,4

4. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2018 yang ditetapkan Inspektorat Kota Yogyakarta, adalah Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat dengan uraian sasaran indikator % rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 83%

Tabel II. 1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD	Misi ke-7	Tujuan	Sasaran
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.

5. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran)

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Inspektorat serta keadaan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Yogyakarta.

a. Kebijakan :

Kebijaksanaan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Inspektorat Kota Yogyakarta.

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur.
2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset.
3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik.
4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang sosial, ekonomi, budaya
5. Peningkatan dan evaluasi pengawasan

Kebijakan Inspektorat :

1. Optimalisasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
2. Meningkatkan pembinaan kepatuhan aparatur
3. Optimalisasi pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset
4. Meningkatkan kualitas review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan
5. Optimalisasi pengawasan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya
6. Meningkatkan kualitas review dokumen akuntabilitas kinerja
7. Optimalisasi pengawasan bidang pembangunan fisik
8. Meningkatkan kualitas review pengadaan barang dan jasa
9. Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
10. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

b. Program :

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka bekerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diimplementasikan menjadi 9 program dan 16 kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur
- VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - 2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
- VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Audit Bidang Pembangunan Fisik
 - 2 Review Pengadaan Barang dan Jasa
- VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya
 - 2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
- IX. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
 - 1. Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU sudah ditetapkan secara formal dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategik Perangkat Daerah 2017 - 2022, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Inspektorat. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

IKU Inspektorat ditampilkan pada tabel dibawah ini

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama Unit	:	
Organisasi	:	Inspektorat Kota Yogyakarta
Tugas Pokok	:	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Urusan	:	Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II. 2
IKU Inspektorat

No.	Sasaran	Uraian Indikator	Target	Sumber Data
1.	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83%	Laporan hasil Pemeriksaan /LHP dari BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tiap SKPD dan Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Internal (oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah /APIP yaitu dari BPKP, Inspektorat Propinsi DIY dan Inspektorat Kota Yogyakarta), maupun Eksternal (oleh Aparat Pengawasan Eksternal yaitu BPK).

Pengukuran sasaran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, dengan target Tahun 2018 sebesar 83% dari jumlah temuan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti oleh SKPD (meliputi temuan BPK, BPKP, Inspektorat DIY maupun Inspektorat Kota Yogyakarta) , setiap tahun diharapkan jumlah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti semakin meningkat

dengan perkiraan setiap tahun bertambah 3%, sehingga sampai dengan tahun 2022, Prosentase capaian kinerja tindak lanjut temuan sebesar 91%. Cara pengukurannya : jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi kali 100%

Tabel II. 3
Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis

No	INDIKATOR	Cara Pengukuran			Sumber Data
1.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}}$	x	100%	Laporan TLHP tiap SKPD
	(Mengukur kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan)	semakin besar % semakin baik diharapkan dapat mencapai di atas 80%			Laporan Pemutakhiran Data hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal
	Tahun 2017 ditargetkan 80%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	586	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	732	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	80%	
	Tahun 2018 ditargetkan 83%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	620	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	742	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	83%	
	Tahun 2019 ditargetkan 85%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	640	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	752	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	85%	
	Tahun 2020 ditargetkan 87%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	665	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	762	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	87%	
	Tahun 2021 ditargetkan 89%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	690	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	772	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	89%	
	Tahun 2022 ditargetkan 91%	Perkiraan Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	=	712	
		Perkiraan Jumlah seluruh rekomendasi	=	782	
		% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	=	91%	

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada Tahun 2018 dan indikator keberhasilan pencapaiannya maka telah ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Dokumen Renja 2018.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022, Renstra, dan IKU Inspektorat Kota Yogyakarta. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Inspektorat Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Sasaran strategis tersebut dituangkan dalam indikator yaitu % (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini sudah disahkan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan direvisi tanggal 16 November 2018.

Tabel II.4 :
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat.	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83 %